

PERAN POLITIK PENDIDIKAN DALAM TRANSFORMASI KURIKULUM NASIONAL DI ERA GLOBALISASI

Fahmi¹, Nur Asliha², Dian Agustina³, Marshanda⁴, Dania Zalyanti⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

fahmi_uin@radenfatah.ac.id, nurasliha21@gmail.com

dianagustinapsht@gmail.com, mmarshanda629@gmail.com,

daniazalyanti@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the political function of education in national curriculum reform amid globalization. The phenomenon of globalization has led to significant changes in the education system due to the demand for 21st-century skills, digital literacy, and global competition. In this context, curriculum reform is not merely a pedagogical process but also a politically charged process influenced by government policies, ideological perspectives, economic interests, and foreign pressure. This study employs a descriptive qualitative approach using a literature review method through the analysis of various educational policy documents, scientific articles, books, and other relevant references. Data were analyzed using content analysis, critical policy analysis, and discourse analysis to explore the interrelationships between educational politics, globalization, and curriculum reform. The findings indicate that educational politics plays a crucial role in determining the direction, content, and implementation of the national curriculum. Curriculum changes in Indonesia reflect the interaction between domestic interests and global demands, particularly regarding the implementation of technology-based learning, the strengthening of character education, the development of competencies, and flexibility within the curriculum. However, this process of change still faces a number of challenges, such as educational disparities, a lack of infrastructure.

Keywords: *education policy, curriculum reform, globalization, national curriculum, education policy*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji fungsi politik pendidikan dalam perubahan kurikulum nasional di tengah globalisasi. Fenomena globalisasi telah menyebabkan perubahan signifikan dalam sistem pendidikan akibat tuntutan akan keterampilan untuk abad ke-21, kemampuan digital, serta persaingan di tingkat global. Dalam hal ini, perubahan kurikulum tidak hanya sekadar sebuah proses pengajaran, melainkan juga sebuah proses yang terkait dengan politik yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, pandangan ideologis, kepentingan ekonomi, serta tekanan dari luar negeri. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode penelitian pustaka melalui analisis berbagai dokumen kebijakan pendidikan, artikel ilmiah, buku, dan referensi lainnya yang relevan. Data dianalisis menggunakan analisis konten, kebijakan kritis, dan analisis wacana untuk menggali keterkaitan antara politik pendidikan, globalisasi, dan perubahan kurikulum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa politik pendidikan memiliki peranan penting

dalam menentukan langkah, isi, dan pelaksanaan kurikulum nasional. Perubahan kurikulum di Indonesia mencerminkan adanya interaksi antara kepentingan dalam negeri dan tuntutan global, terutama berkaitan dengan penerapan pembelajaran yang berbasis teknologi, penguatan karakter pendidikan, pengembangan kemampuan, dan fleksibilitas di dalam kurikulum. Namun, proses perubahan tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kesenjangan dalam pendidikan, kurangnya infrastruktur, kesiapan para guru, dan ketidakpastian dalam kebijakan. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan perlu bersifat adaptif, inklusif, dan berkelanjutan untuk menciptakan kurikulum yang relevan dengan perkembangan global tanpa mengesampingkan identitas nasional dan pemerataan pendidikan.

Kata Kunci: politik pendidikan, perubahan kurikulum, globalisasi, kurikulum nasional, kebijakan pendidikan

A. Pendahuluan

Globalisasi telah menjadi kekuatan transformatif yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem pendidikan nasional. Arus globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi, mobilitas informasi, serta integrasi ekonomi dan budaya lintas negara menuntut adanya penyesuaian dalam kebijakan pendidikan, khususnya dalam pengembangan kurikulum. Kurikulum tidak lagi dipandang sebagai perangkat teknis semata, melainkan sebagai hasil konstruksi sosial dan politik yang mencerminkan kepentingan, ideologi, serta arah pembangunan suatu bangsa (Handoyo, 2025).

Dalam konteks ini, politik pendidikan memainkan peran strategis dalam menentukan arah dan

bentuk transformasi kurikulum nasional. Kebijakan kurikulum sering kali dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan, kepentingan politik, serta tuntutan global yang berkembang. Misalnya, perubahan kurikulum di Indonesia pascareformasi menunjukkan adanya keterkaitan erat antara perubahan sistem politik dengan arah kebijakan pendidikan, termasuk dalam penyesuaian terhadap standar global dan kebutuhan pasar kerja (Istanti, 2019). Hal ini menegaskan bahwa kurikulum bukanlah entitas yang netral, melainkan produk dari proses negosiasi berbagai aktor politik dan sosial.

Lebih lanjut, globalisasi juga mendorong munculnya standar pendidikan internasional seperti *International Baccalaureate* dan *Cambridge Curriculum*, yang secara

tidak langsung memengaruhi kebijakan kurikulum nasional di berbagai negara (Abdullah, 2026). Kondisi ini menimbulkan dilema antara mempertahankan identitas nasional dengan mengadopsi praktik global yang dianggap lebih kompetitif. Oleh karena itu, transformasi kurikulum nasional perlu mempertimbangkan keseimbangan antara nilai lokal dan tuntutan global agar tetap relevan dan kontekstual (Suhartini & Hasibullah, 2025).

Selain itu, dinamika politik pendidikan juga berperan dalam menentukan prioritas, isi, dan implementasi kurikulum, termasuk dalam hal integrasi nilai, kompetensi abad ke-21, serta literasi digital. Kebijakan pendidikan yang responsif terhadap globalisasi harus mampu mengakomodasi perubahan tersebut tanpa mengabaikan aspek pemerataan dan keadilan pendidikan (Asriyanti & Musgamy, 2025). Dengan demikian, peran politik pendidikan menjadi krusial dalam memastikan bahwa transformasi kurikulum tidak hanya mengikuti tren global, tetapi juga berorientasi pada kepentingan nasional jangka panjang.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji

bagaimana politik pendidikan memengaruhi proses transformasi kurikulum nasional di era globalisasi, serta implikasinya terhadap kualitas dan arah pendidikan di Indonesia.

Kajian literatur menunjukkan bahwa hubungan antara politik pendidikan, globalisasi, dan transformasi kurikulum bersifat kompleks dan multidimensional. Kurikulum tidak hanya dipahami sebagai perangkat pedagogis, tetapi juga sebagai arena ideologis dan politik yang dipengaruhi oleh kekuatan global, kepentingan negara, serta dinamika ekonomi. Teori-teori seperti *human capital theory*, *world systems theory*, dan *critical policy theory* menjelaskan bagaimana globalisasi membentuk arah kebijakan pendidikan dan mendorong restrukturisasi kurikulum agar selaras dengan tuntutan global sekaligus kepentingan nasional (Rizvi & Lingard, 2009).

1. Teori Politik Pendidikan

Politik pendidikan merujuk pada proses pengambilan keputusan yang melibatkan kekuasaan, ideologi, dan kepentingan dalam menentukan arah kebijakan pendidikan. Secara

teoretis, Ozga dan Lingard menegaskan bahwa kebijakan pendidikan merupakan hasil dari interaksi antara aktor politik, struktur kekuasaan, dan konteks global yang membentuk agenda pendidikan (Ozga & Lingard, 2007). Dalam perspektif ini, kurikulum menjadi instrumen politik untuk mentransmisikan nilai, identitas nasional, serta kepentingan ideologis negara.

Selain itu, Lim (2016) menekankan bahwa negara tetap memiliki peran kuat (*strong state*) dalam mengendalikan kebijakan pendidikan meskipun berada dalam tekanan globalisasi. Hal ini menunjukkan bahwa politik pendidikan berfungsi sebagai mediator antara tekanan global dan kebutuhan lokal dalam transformasi kurikulum. Sunarso menjelaskan secara detail bahwa politik pendidikan pada era orde lama lebih menekankan pada semangat revolusi, pendidikan bertujuan untuk menanamkan patriotisme dan semangat nasionalisme. Di era orde baru,

politik pendidikan diwarnai semangat untuk melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen, serta semangat untuk melakukan pembangunan ekonomi. Pendidikan bertujuan untuk membentuk manusia pembangunan yang berjiwa Pancasila yang dapat mendukung pembangunan ekonomi. Di era reformasi, politik pendidikan Indonesia mengalami pergeseran. Politik pendidikan Indonesiapada masa ini diarahkan kepada perwujudan masyarakat demokratis yang taat pada hukum. Tujuan pendidikan era reformasi diatur melalui UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) (Yasdin, 2023).

2. Teori Kurikulum

Kurikulum dalam perspektif teoretis tidak bersifat netral, melainkan merupakan konstruksi sosial yang mencerminkan nilai dan kepentingan tertentu. Menurut (Anderson-Levitt, 2008), kurikulum dipengaruhi oleh berbagai aliran pemikiran,

termasuk modernisme, teori sistem dunia, dan pendekatan kritis yang melihat kurikulum sebagai hasil dari proses globalisasi. Sementara itu, (Waks, 2003) melalui teori institusional menyatakan bahwa perubahan kurikulum sering kali dipengaruhi oleh struktur kelembagaan yang membatasi inovasi, meskipun globalisasi mendorong perubahan fundamental.

(Priestley, 2002) juga menyoroti bahwa kebijakan kurikulum merupakan bagian dari rekonstruksi nasional yang dipengaruhi oleh wacana global, terutama dalam hal standar kompetensi dan evaluasi pendidikan. Kurikulum sebagai suatu sistem pendidikan tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai daftar mata pelajaran atau dokumen administratif semata. Ia memiliki berbagai dimensi yang saling berkaitan dan membentuk suatu konstruksi konseptual maupun praktis dalam penyelenggaraan pendidikan. Dimensi kurikulum

menunjukkan keluasan dan kedalaman makna kurikulum, baik sebagai ide, rencana, proses, maupun hasil. Memahami dimensi kurikulum menjadi penting agar pengembangan dan implementasinya tidak terjebak pada pendekatan yang sempit dan teknis, melainkan bersifat komprehensif dan reflektif.

Salah satu cara untuk memahami dimensi kurikulum adalah melalui pembedaan antara kurikulum sebagai ide, dokumen, proses, dan hasil. Ornstein dan Hunkins (2018) menjelaskan bahwa kurikulum dapat dipandang dari berbagai perspektif: sebagai rencana tertulis, sebagai pengalaman belajar yang dirancang, serta sebagai realitas yang dialami peserta didik. Dalam konteks ini, kurikulum memiliki dimensi konseptual dan operasional. Dimensi konseptual berkaitan dengan gagasan, nilai, dan filosofi yang melandasi kurikulum, sedangkan dimensi operasional berkaitan dengan implementasi konkret dalam praktik pembelajaran.

3. Teori Globalisasi dalam Pendidikan

Globalisasi dalam pendidikan dapat dipahami melalui beberapa pendekatan teoretis utama:

a. *World Systems Theory*

Teori ini menjelaskan bahwa sistem pendidikan, termasuk kurikulum, dipengaruhi oleh struktur ekonomi global dan relasi antara negara pusat dan perifer (Morrow & Torres, 2013). Negara berkembang sering mengadopsi model kurikulum dari negara maju untuk meningkatkan daya saing global.

b. *Human Capital Theory*

Teori ini menempatkan pendidikan sebagai investasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas individu dan daya saing negara (Winter, 2012). Dalam konteks ini, kurikulum diarahkan pada pengembangan keterampilan abad ke-21,

seperti literasi digital dan kompetensi global.

c. *Global Culture Theory*

(Dale, 2010) mengemukakan bahwa globalisasi menciptakan “budaya pendidikan dunia” (*world education culture*) yang mendorong homogenisasi kurikulum di berbagai negara, meskipun implementasinya tetap dipengaruhi oleh konteks lokal.

Teori globalisasi dalam pendidikan merupakan konsep yang menjelaskan bahwa perkembangan dunia yang semakin terhubung melalui teknologi, ekonomi, komunikasi, dan budaya memberikan pengaruh besar terhadap sistem pendidikan di berbagai negara. Globalisasi menyebabkan pendidikan tidak lagi bersifat lokal, tetapi menjadi bagian dari sistem internasional yang saling berkaitan. Dalam era globalisasi, lembaga pendidikan dituntut untuk mampu menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki

kemampuan berpikir kritis, kreatif, serta mampu bersaing secara global. Perkembangan teknologi informasi juga mendorong perubahan metode pembelajaran menjadi lebih modern dan berbasis digital sehingga proses pendidikan menjadi lebih efektif dan fleksibel (Maharani, R., 2022). Selain itu, globalisasi pendidikan ditandai dengan adanya pertukaran ilmu pengetahuan antarnegara, penggunaan kurikulum berbasis kompetensi global, serta meningkatnya penggunaan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar (M. Amalia, S. Lestari, 2024).

4. Teori Transformasi Kurikulum

Transformasi kurikulum merupakan suatu proses perubahan dan pembaruan kurikulum yang dilakukan secara sistematis untuk menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam dunia

pendidikan modern, kurikulum tidak lagi dipandang sebagai dokumen yang bersifat tetap, melainkan sebagai sistem yang dinamis dan harus mampu beradaptasi terhadap perubahan sosial, budaya, ekonomi, maupun perkembangan global. Transformasi kurikulum dilakukan untuk menciptakan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan peserta didik serta tuntutan kompetensi abad ke-21, seperti kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan literasi digital.

Selain itu, transformasi kurikulum juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi digital dan revolusi industri 4.0 yang menuntut pendidikan untuk lebih inovatif dan berbasis teknologi. Penggunaan media digital, pembelajaran berbasis proyek, serta integrasi teknologi informasi dalam proses pembelajaran menjadi bagian penting dalam transformasi kurikulum saat ini. Arifandi, A., (2022) menyatakan bahwa

pengembangan kurikulum modern harus mampu mengintegrasikan kebutuhan masyarakat, perkembangan teknologi, serta nilai-nilai karakter dalam pembelajaran agar pendidikan tidak hanya menghasilkan peserta didik yang cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kemampuan sosial dan moral yang baik. Dengan demikian, teori transformasi kurikulum dapat dipahami sebagai konsep perubahan pendidikan yang bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran melalui inovasi kurikulum yang relevan, fleksibel, dan sesuai dengan perkembangan zaman.

5. Keterkaitan Politik Pendidikan dan Transformasi Kurikulum

Secara integratif, hubungan antara politik pendidikan dan transformasi kurikulum dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Politik pendidikan menentukan arah kebijakan kurikulum

melalui regulasi dan kekuasaan negara

- Globalisasi memberikan tekanan eksternal yang memengaruhi isi dan standar kurikulum
- Kurikulum menjadi arena negosiasi antara nilai lokal dan tuntutan global
- Transformasi kurikulum merupakan hasil interaksi antara aktor politik, ekonomi, dan budaya

(Rizvi & Lingard, 2009) menegaskan bahwa globalisasi tidak hanya memengaruhi isi kebijakan pendidikan, tetapi juga cara kebijakan tersebut dirumuskan dan diimplementasikan di tingkat nasional.

Politik pendidikan merupakan seluruh kebijakan, keputusan, dan arah pemerintah dalam mengatur sistem pendidikan nasional. Politik pendidikan sangat berpengaruh terhadap perubahan dan transformasi kurikulum karena kurikulum pada dasarnya adalah produk kebijakan negara yang disusun sesuai ideologi, kebutuhan

pembangunan, kondisi sosial, ekonomi, serta arah politik pemerintah (Hasbullah, 2022). Dalam konteks Indonesia, perubahan kurikulum dari masa ke masa selalu berkaitan erat dengan perubahan kebijakan politik dan orientasi pemerintahan (Akbar, 2025).

Transformasi kurikulum adalah proses perubahan dan pembaruan sistem pembelajaran, materi ajar, metode, serta tujuan pendidikan agar sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Transformasi ini dapat dipengaruhi oleh dinamika politik, perkembangan teknologi, globalisasi, dan tuntutan kompetensi abad ke-21 (Hamalik, 2022). Pemerintah melalui kebijakan politik pendidikan menentukan arah kurikulum untuk membentuk karakter, kompetensi, dan identitas nasional peserta didik (Rusman, 2022).

B. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam kajian “Peran Politik Pendidikan dalam Transformasi Kurikulum Nasional di Era Globalisasi” menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis studi kepustakaan (library research) yang dipadukan dengan analisis kebijakan pendidikan, karena pendekatan ini dinilai mampu mengkaji secara mendalam hubungan antara kekuasaan politik, dinamika globalisasi, dan perubahan kurikulum. Data penelitian diperoleh dari sumber primer berupa dokumen resmi seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan dokumen kurikulum nasional, serta sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku akademik, dan laporan penelitian yang relevan (Lingard, 2009). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan kajian literatur sistematis dari berbagai database akademik guna memastikan kelengkapan dan validitas data (Wibowo et al., 2025). Analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi tema dan arah kebijakan, analisis kebijakan kritis (critical policy analysis) untuk mengkaji relasi kekuasaan dan ideologi dalam kebijakan pendidikan,

serta analisis wacana (discourse analysis) untuk memahami konstruksi globalisasi dalam kebijakan kurikulum (Anderson & Holloway, 2020). Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, kecukupan referensi ilmiah, dan konsistensi analisis teoritis (Alasuutari, 2004). Prosedur penelitian meliputi identifikasi masalah, pengumpulan dan seleksi data, analisis mendalam, hingga penarikan kesimpulan secara interpretatif guna memperoleh pemahaman komprehensif tentang peran politik pendidikan dalam transformasi kurikulum nasional di era globalisasi (Vulliamy*, 2004).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Peran Politik Pendidikan dalam Transformasi Kurikulum Nasional di Era Globalisasi

Transformasi kurikulum nasional di era globalisasi tidak dapat dilepaskan dari peran politik pendidikan yang secara signifikan menentukan arah, isi, dan implementasi kebijakan pendidikan. Berdasarkan berbagai kajian, kurikulum bukan sekadar perangkat pedagogis, melainkan juga instrumen strategis negara untuk membentuk identitas, ideologi, dan daya saing

bangsa dalam konteks global (Alhamuddin, 2014). Globalisasi telah mendorong perubahan besar dalam sistem pendidikan dengan menghadirkan tuntutan baru seperti kompetensi abad ke-21, literasi digital, serta kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Namun, dalam proses adaptasi tersebut, keputusan-keputusan terkait kurikulum tidak bersifat netral, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan politik, baik di tingkat nasional maupun global.

Salah satu bentuk nyata peran politik pendidikan terlihat dalam proses perumusan kebijakan kurikulum yang sering kali mencerminkan agenda pemerintah dan arah pembangunan nasional. Perubahan kurikulum di Indonesia, misalnya, menunjukkan adanya keterkaitan erat antara dinamika politik dan kebijakan pendidikan, di mana setiap rezim cenderung menghadirkan reformasi kurikulum sesuai dengan visi ideologis dan prioritas pembangunan yang diusung (Khunaifi & Matlani, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa kurikulum menjadi arena kontestasi berbagai kepentingan, termasuk kepentingan ekonomi, sosial, dan budaya, yang

saling berinteraksi dalam menentukan arah pendidikan nasional.

Kesenjangan Pendidikan dan Politik Pemerataan Kurikulum

Salah satu isu krusial dalam transformasi kurikulum nasional adalah kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki tantangan geografis yang menyebabkan distribusi sumber daya pendidikan tidak merata. Dalam konteks politik pendidikan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan kurikulum dapat diimplementasikan secara adil di seluruh wilayah.

Transformasi kurikulum berbasis teknologi berpotensi memperlebar kesenjangan apabila tidak diiringi dengan pemerataan infrastruktur pendidikan. Sekolah di wilayah perkotaan cenderung lebih siap dalam mengimplementasikan pembelajaran digital dibandingkan sekolah di daerah terpencil. Hal ini menimbulkan risiko ketimpangan kualitas pembelajaran yang berdampak pada kesenjangan hasil pendidikan.

Oleh karena itu, kebijakan transformasi kurikulum harus diiringi

dengan kebijakan pemerataan akses pendidikan, termasuk pembangunan infrastruktur digital, penyediaan perangkat teknologi, serta peningkatan kompetensi guru di daerah tertinggal. Pemerataan pendidikan merupakan salah satu indikator keberhasilan politik pendidikan dalam mewujudkan keadilan sosial.

Kesenjangan dalam mutu pendidikan antara wilayah masih menjadi masalah utama dalam implementasi transformasi kurikulum nasional di Indonesia (Birliği & Teşkilatı, 2021). Karena Indonesia merupakan negara kepulauan, akses terhadap pendidikan berkualitas belum dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat dengan merata (Reuge et al., 2021). Umumnya, sekolah di daerah perkotaan memiliki fasilitas belajar yang lebih lengkap, tenaga pengajar yang memadai, dan akses teknologi yang lebih baik dibandingkan dengan sekolah-sekolah di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan (Malpass, 2022). Dalam konteks politik pendidikan, negara bertanggung jawab untuk memastikan hak atas pendidikan bagi semua warga negara tanpa memandang perbedaan wilayah

atau kondisi sosial ekonomi (Masitoh & Cahyani, 2020). Ki Hadjar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan seharusnya memberikan peluang yang sama bagi setiap individu untuk berkembang sesuai dengan potensi kemanusiaannya (Dewantara, 2013). Oleh karena itu, kebijakan kurikulum tidak hanya fokus pada perubahan konten pembelajaran, tetapi juga harus memperhatikan kesiapan masing-masing daerah dalam melaksanakan kebijakan ini secara adil dan merata (Maharani, R., 2022). Menurut Paulo Freire, pendidikan yang tidak memberikan akses yang setara hanya akan menciptakan ketimpangan sosial baru dalam masyarakat (Fridiyanto et al., 2022).

Perubahan Paradigma Pembelajaran dalam Kurikulum Baru

Transformasi kurikulum nasional tidak hanya mengubah isi pembelajaran, tetapi juga mengubah paradigma pembelajaran secara fundamental. Paradigma lama yang berfokus pada hafalan dan transfer pengetahuan mulai bergeser menuju pembelajaran berbasis kompetensi dan pengalaman belajar.

Kurikulum modern menekankan pentingnya pembelajaran aktif, kolaboratif, serta berbasis proyek. Peserta didik didorong untuk menjadi subjek pembelajaran yang aktif, bukan hanya penerima informasi. Perubahan paradigma ini menuntut perubahan peran guru dari sumber utama pengetahuan menjadi fasilitator pembelajaran.

Perubahan paradigma pembelajaran juga berkaitan dengan peningkatan keterampilan abad ke-21, seperti kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Kompetensi tersebut dianggap penting untuk menghadapi dinamika dunia kerja yang semakin kompleks dan kompetitif.

Peran Guru dalam Transformasi Kurikulum

Guru memiliki posisi yang sangat krusial dalam proses perubahan kurikulum karena mereka adalah pelaksana utama dari kebijakan pendidikan dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari (H. E. Mulyasa, 2021). Transformasi kurikulum tidak akan efektif jika guru tidak mengerti tentang tujuan, metode, dan arah pergeseran yang ingin

dicapai dalam sistem pendidikan nasional (Sanjaya, 2006). Dalam kurikulum yang modern, peran guru tidak hanya sekedar menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu siswa untuk aktif selama proses belajar, sekaligus mengembangkan potensi diri secara mandiri (Hamalik, 2008). Pergantian paradigma belajar yang berfokus pada siswa membuat guru harus mampu menciptakan suasana belajar yang kreatif, inovatif, dan interaktif agar siswa lebih aktif dalam memahami isi materi (Siska, 2024). Selain itu, guru juga bertanggung jawab dalam membentuk karakter, sikap sosial, dan nilai-nilai moral siswa agar mereka dapat menghadapi tantangan kehidupan modern dengan baik (Tilaar, 2003).

Keterlibatan Masyarakat dalam Kebijakan Pendidikan

Transformasi kurikulum tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan sekolah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat. Orang tua, dunia usaha, serta komunitas pendidikan memiliki peran penting dalam mendukung implementasi kurikulum

Keterlibatan masyarakat dalam kebijakan pendidikan berperan krusial

dalam mendukung keberhasilan sistem pendidikan yang ada di negara kita (Pidarta, 2007). Pendidikan bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah dan institusi pendidikan, tetapi juga memerlukan dukungan dari orang tua, pemuka masyarakat, dan lingkungan sosial agar proses belajar dapat berlangsung dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Akmal et al., 2025). Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui kerja sama dengan sekolah, pemantauan terhadap pelaksanaan pendidikan, serta dukungan terhadap kegiatan belajar peserta didik di sekitarnya (Sagala, 2017).

Di samping itu, keikutsertaan masyarakat juga berfungsi dalam meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kebijakan pendidikan (Arifin, 2009). Kerjasama antara sekolah, masyarakat, dan sektor bisnis dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih nyata melalui aktivitas sosial, pelatihan keterampilan, serta program praktik kerja untuk peserta didik (Pidarta, 2007). Dukungan dari orang tua dalam proses pendidikan juga berpengaruh terhadap motivasi serta perkembangan belajar peserta didik di sekolah (Akmal et al., 2025).

Transformasi Kurikulum dan Kebutuhan Dunia kerja

Salah satu tujuan utama transformasi kurikulum adalah meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Perubahan struktur ekonomi global menuntut tenaga kerja yang memiliki keterampilan adaptif, kreatif, serta mampu bekerja dalam lingkungan yang dinamis.

Kerja sama antara sekolah dan masyarakat bisa memperkaya pengalaman belajar siswa melalui berbagai aktivitas praktis dan kontekstual (Pendidikan et al., 2022). Program magang, proyek sosial, kegiatan kewirausahaan, serta pembelajaran berdasarkan komunitas dapat memberikan pengalaman nyata yang tidak hanya didapat dari pembelajaran di kelas (Antoninis et al., 2023). Melalui kegiatan ini, siswa dapat belajar berkolaborasi, berkomunikasi, memimpin, dan menyelesaikan masalah secara langsung di lingkungan mereka (Birliđi & Teşkilatı, 2021). Pendekatan pembelajaran seperti ini sangat penting untuk mengembangkan keterampilan abad ke-21 yang memfokuskan pada kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi,

dan komunikasi (Reuge et al., 2021). Paulo Freire berpendapat bahwa pendidikan yang baik adalah yang mampu menghubungkan proses belajar dengan kenyataan masyarakat sehingga siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga dapat menghadapi masalah nyata di sekitarnya (Fridiyanto et al., 2022). Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dapat membantu menciptakan pembelajaran yang lebih relevan, bermakna, dan sesuai dengan kebutuhan kehidupan sosial.

Stabilisasi Kebijakan sebagai Faktor Keberhasilan Transformasi

Keberhasilan transformasi kurikulum tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan, tetapi juga oleh stabilitas kebijakan tersebut dalam jangka panjang. Perubahan kebijakan yang terlalu sering dapat menimbulkan ketidakpastian di tingkat implementasi.

Stabilitas kebijakan memungkinkan sekolah dan guru memiliki waktu yang cukup untuk beradaptasi dan mengembangkan praktik pembelajaran yang efektif. Oleh karena itu, politik pendidikan perlu memastikan keberlanjutan kebijakan pendidikan melalui

perencanaan jangka panjang yang konsisten..

Integrasi Nilai Lokal dalam Kurikulum Global

Salah satu tantangan terbesar dalam globalisasi pendidikan adalah menjaga keseimbangan antara nilai global dan nilai lokal. Kurikulum nasional perlu mengintegrasikan kearifan lokal agar pendidikan tetap relevan dengan konteks sosial budaya masyarakat.

Integrasi nilai lokal dalam kurikulum dapat dilakukan melalui penguatan muatan lokal, pembelajaran berbasis budaya, serta pengembangan pendidikan karakter. Pendekatan ini membantu peserta didik memahami identitas budaya sekaligus memiliki wawasan global.

Pentingnya menyisipkan nilai-nilai lokal dalam kurikulum global semakin terasa karena pengaruh besar globalisasi dalam pendidikan berdampak pada sistem nilai dan budaya para siswa (Antoninis et al., 2023). Dalam situasi ini, kurikulum nasional harus tetap melestarikan identitas budaya bangsa dengan memperkuat kearifan lokal, sehingga siswa tidak kehilangan jati diri di tengah arus globalisasi (Pendidikan et al., 2022). Nilai-nilai lokal seperti kerja

sama, toleransi, dan kepedulian sosial bisa dimasukkan melalui pembelajaran yang berfokus pada konteks daerah dan pengalaman nyata dalam kehidupan masyarakat (Asian Development Bank, 2020). Pendekatan ini menjadikan pembelajaran lebih relevan karena mengaitkan materi sekolah dengan kehidupan sehari-hari siswa (Antoninis et al., 2023).

Digitalisasi Pendidikan dan Transformasi Sistem Pembelajaran Nasional

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam sistem pendidikan di seluruh dunia. Digitalisasi pendidikan tidak hanya memengaruhi metode pembelajaran, tetapi juga mengubah struktur kurikulum, sistem evaluasi, serta pola interaksi antara guru dan peserta didik. Transformasi digital menjadi salah satu faktor utama yang mendorong perubahan kebijakan pendidikan di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Dalam konteks politik pendidikan, digitalisasi menjadi agenda strategis yang harus diakomodasi dalam kebijakan kurikulum nasional. Pemerintah berupaya mengintegrasikan literasi

digital, teknologi informasi, serta pembelajaran daring sebagai bagian dari kompetensi dasar peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa kurikulum tidak lagi dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi yang terus berkembang.

Evaluasi Kebijakan Kurikulum sebagai Bagian dari Proses Politik Pendidikan

Transformasi kurikulum merupakan proses berkelanjutan yang memerlukan evaluasi secara periodik. Evaluasi kebijakan kurikulum bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam perspektif politik pendidikan, evaluasi kebijakan menjadi bagian penting dalam siklus perumusan kebijakan.

Evaluasi terhadap kurikulum adalah elemen krusial untuk memastikan bahwa perubahan dalam dunia pendidikan berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan (Patton, 2015). Fungsi evaluasi tidak hanya sebatas menilai hasil akhir pembelajaran, tetapi juga untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan kebijakan kurikulum berjalan dengan efektif di tingkat sekolah (Fitzpatrick, Sanders, dan Worthen, 2011). Dalam

konteks pendidikan yang berkaitan dengan politik, evaluasi menjadi alat penting untuk memberikan masukan kepada pengambil kebijakan agar mereka dapat melakukan perbaikan yang berkelanjutan (Cohen, Manion, dan Morrison, 2018). Michael Quinn Patton menekankan bahwa evaluasi yang baik harus responsif, melibatkan partisipasi, dan mampu memberikan informasi berharga untuk pengambilan keputusan kebijakan yang tepat (Patton, 2015). Dengan kata lain, evaluasi kebijakan kurikulum merupakan elemen penting dalam siklus kebijakan pendidikan yang terus bergerak.

Perbandingan Reformasi Kurikulum Indonesia dengan Negara Lain

Transformasi kurikulum tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara di dunia. Banyak negara melakukan reformasi kurikulum untuk menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan abad ke-21. Negara seperti Finlandia, Singapura, dan Korea Selatan dikenal berhasil melakukan reformasi kurikulum yang berorientasi pada kompetensi dan inovasi.

Pembelajaran dari negara lain menunjukkan bahwa keberhasilan

reformasi kurikulum dipengaruhi oleh konsistensi kebijakan, kualitas guru, serta dukungan masyarakat. Negara-negara tersebut menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional.

Perbandingan reformasi kurikulum di Indonesia dengan negara-negara lain menunjukkan bahwa perubahan dalam pendidikan adalah fenomena yang bersifat global dan terjadi di banyak sistem pendidikan di seluruh dunia. Negara-negara seperti Finlandia, Singapura, dan Korea Selatan telah berhasil melakukan perubahan kurikulum dengan fokus pada pendekatan yang berbasis kompetensi, inovasi dalam pembelajaran, dan peningkatan profesionalisme para pendidiknya. Dalam hal ini, Finlandia dikenal memiliki sistem pendidikan yang fleksibel, yang mengutamakan kesejahteraan para siswa dan pembelajaran yang berfokus pada fenomena. Di sisi lain, Singapura menawarkan kurikulum yang ketat tetapi bisa beradaptasi dengan kebutuhan ekonomi yang berbasis pengetahuan. Menurut Pasi Sahlberg, keberhasilan dalam reformasi pendidikan sangat tergantung pada konsistensi kebijakan, kualitas

pengajaran, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan yang ada. Dengan demikian, keberhasilan dalam reformasi kurikulum sangat bergantung pada komitmen nasional untuk menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan.

Pendidikan Karakter dalam Kurikulum Nasional

Selain kompetensi akademik, kurikulum nasional juga menekankan pentingnya pendidikan karakter. Pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk peserta didik yang memiliki integritas, tanggung jawab, serta kepedulian sosial. Nilai-nilai karakter menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat yang beradab dan berkeadilan.

Pengajaran karakter dalam kurikulum nasional memiliki posisi yang krusial dalam menciptakan siswa yang tidak hanya cemerlang di bidang akademis, tetapi juga memiliki sifat yang baik dalam interaksi sosial mereka (Lickona, 2012). Pendidikan karakter berfokus pada pengembangan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian sosial yang menjadi pondasi untuk membangun masyarakat yang beradab (UNESCO,

2020). Dalam era pendidikan modern, penguatan karakter semakin vital karena tantangan global menuntut tidak hanya kecerdasan intelektual, tetapi juga kemampuan moral dan etika dalam pengambilan keputusan (OECD, 2021). Diungkapkan oleh Thomas Lickona, pendidikan karakter mesti diintegrasikan secara menyeluruh dalam setiap aspek pembelajaran agar siswa benar-benar memahami dan menerapkan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari mereka (Lickona, 2012). Oleh karena itu, pendidikan karakter merupakan dasar utama dalam menciptakan generasi yang memiliki integritas dan tanggung jawab.

Inovasi Pembelajaran dan Penguatan Ekosistem Pendidikan

Transformasi kurikulum tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan untuk membangun ekosistem pendidikan yang inovatif dan kolaboratif. Ekosistem pendidikan yang kuat mencakup sinergi antara sekolah, perguruan tinggi, pemerintah, dunia industri, serta masyarakat luas. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa proses pendidikan tidak berjalan secara terisolasi, tetapi terhubung

dengan kebutuhan nyata masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan.

D. Kesimpulan

Transformasi kurikulum nasional di era globalisasi menunjukkan bahwa politik pendidikan memainkan peran yang sangat krusial dalam mengarahkan, menentukan isi, dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Kurikulum tidak hanya berfungsi sebagai alat pembelajaran, tetapi juga sebagai instrumen strategis bagi negara dalam membentuk mutu sumber daya manusia, karakter bangsa, serta daya saing di tingkat internasional. Globalisasi mendorong perubahan kurikulum agar lebih fleksibel terhadap kemajuan teknologi, keperluan dunia kerja, dan kompetensi abad ke-21, yang mencakup kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kerja sama, serta literasi digital. Dalam proses ini, politik pendidikan berperan sebagai jembatan antara tuntutan global dan kepentingan nasional agar kurikulum dapat tetap mempertahankan identitas budaya dan nilai-nilai lokal di tengah perubahan global yang cepat.

Selain itu, keberhasilan dalam mengubah kurikulum sangat tergantung pada stabilitas kebijakan, kesiapan para guru, pemerataan fasilitas pendidikan, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pendidikan. Digitalisasi pendidikan dan inovasi dalam pembelajaran menciptakan banyak peluang untuk meningkatkan mutu pendidikan, namun juga membawa tantangan terkait kurangnya akses teknologi dan ketimpangan dalam kualitas pendidikan di berbagai wilayah. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyusun kebijakan pendidikan yang berkelanjutan, inklusif, dan peka terhadap perubahan zaman. Dengan cara itu, transformasi kurikulum di Indonesia diharapkan dapat menghasilkan sistem pendidikan yang adaptif, adil, berbasis karakter, dan sesuai dengan kebutuhan masa depan masyarakat global.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2026). Perubahan Kurikulum, Idealitas, Trend, Persaingan Global dan Kepentingan Politik di Indonesia. *Advances In Education Journal*, 2(4), 205–210.
- Akmal, M., Rosalina, R., & Khasanah, N. (2025). Peran Sosiologi Pendidikan dalam Mewujudkan Keadilan Sosial pada Lembaga Pendidikan yang Inklusif di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(6), 1054–1063.
- Alasuutari, P. (2004). The globalization of qualitative research. *Qualitative research practice*, 595–608.
- Alhamuddin, A. (2014). Sejarah Kurikulum di Indonesia (Studi Analisis Kebijakan Pengembangan Kurikulum). *Nur El-Islam*, 1(2), 48–58.
- Aminah, I. A. N., & Sya'bani, M. A. Y. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi*, 6(2), 293. <https://doi.org/10.32529/al-ilm.v6i2.2804>
- Anderson-Levitt, K. M. (2008). Globalization and curriculum. *The SAGE handbook of curriculum and instruction*, 349–368.
- Anderson, K. T., & Holloway, J. (2020). Discourse analysis as theory, method, and epistemology in studies of education policy. *Journal of Education Policy*, 35(2), 188–221.
- Anggraini, D., & Purnomo, H. (2025). Implementasi Pendidikan Karakter melalui Budaya Sekolah. *Jurnal Ilmiah Widya Pustaka Pendidikan*, 13(a), 162–174.
- Antoninis, M., Alcott, B., Al Hadheri, S., April, D., Fouad Barakat, B., Barrios Rivera, M., Baskakova, Y., Barry, M., Bekkouche, Y., & Caro Vasquez, D. (2023). *Global Education Monitoring Report 2023: Technology in education: A tool on whose terms?*
- Ariani, R., & Festiyed, F. (2019). Analisis landasan ilmu pengetahuan dan teknologi pendidikan dalam pengembangan multimedia interaktif. Universitas Negeri Padang.
- Arifandi, A., Billah, M. E. M., & S.

- (2022). Pengembangan Kurikulum Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Kajian Aswaja*, 8(1).
- Arifin, Z. (2009). *Evaluasi pembelajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Asriyanti, S., & Musgamy, A. (2025). ANALISIS PERKEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENDIDIKAN DI INDONESIA. *Jurnal Kependidikan*, 10(1), 62–69.
- Azhari, H. H. (2026). *Teori-Teori Kurikulum*. Lenggong Geni Pustaka.
- Basri, H. (2023). Dampak Globalisasi terhadap Sistem Pendidikan: Perspektif Sosiologi Pendidikan. *Al-Murabbi Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1).
- Birliği, E. İ., & Teşkilatı, K. (2021). *Education at a Glance 2021: OECD Indicators*. OECD Publishing, Paris.
- Bruner, J. S. (1974). *Toward a theory of instruction*. Harvard university press.
- Dale, R. (2010). Globalization and curriculum. *International encyclopedia of education*.
- Dendodi, D. (2024). The Dampak dan Tantangan terhadap Transformasi Kurikulum di Satuan Pendidikan. *Journal of Education Research*, 5(2).
- Desvianti, D., Desyandri, D., & Darmansyah, D. (2020). Peningkatan Proses Pembelajaran PKN dengan Menggunakan Model Cooperative Learning Tipe Numbered Heads Together (NHT) di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 4(4), 1201–1211.
- Dewantara, K. H. (2013). Pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka. Yogyakarta. *Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa*.
- Dewey, J. (1930). *Democracy and education: An introduction to the philosophy of education* (Vol. 8). Macmillan New York.
- Dkk, M. D. A. (2025). Analisis Dinamika Perubahan Kurikulum di Indonesia Faktor Politik, Sosial, dan Pendidikan. *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 3(1).
- Durkheim, E., & Pickering, W. S. (2014). *Durkheim: Essays on morals and education*.
- Fatimah, W. (2019). Kontribusi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share (TPS) Terhadap Hasil Belajar Ips. *Satya Widya Jurnal Penelitian Pengembangan Kependidikan*.
- Fauzi, I. J., & Kumara, H. A. (2025). Implementasi Gamifikasi sebagai Strategi Pembelajaran Sejarah Untuk Meningkatkan Keterlibatan Sosial dan Pemahaman Siswa dalam Konteks Zone of Proximal Development. *Jurnal Wahana Pendidikan*, 12(1), 109–122.
- Fridiyanto, F., Purwaningrum, S., Abdullah, A. R., Rosi, F., Haryanto, T., Farih, A., Zulisa, E., Abidin, N., Sari, M., & Setyawan, C. E. (2022). *Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka*. Literasi Nusantara Abadi.
- Frisnoiry. (2024). Transformasi Pendidikan Menuju Literasi dalam Era Globalisasi: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Pendidikan Matematika Malikussaleh*, 4(1).
- Fullan, M. (2016). *The new meaning of educational change*. Teachers college press.
- Hamalik, O. (2008). *Kurikulum dan Pembelajaran* Jakarta: Bumi Aksara. C et.
- Hamalik, O. (2022). *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik*. Remaja Rosdakarya.
- Handoyo, E. (2025). GLOBALISASI, KEBIJAKAN PENDIDIKAN, DAN REFORMASI KEBIJAKAN: KAJIAN LITERATUR. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 11(02), 412–417.
- Hasbullah. (2022). *Pengantar Politik*

- Pendidikan. RajaGrafindo Persada.
- Illich, I. (1971). *Deschooling Society*; Ivan D. Illich. Calder and Boyars.
- Istanti, D. J. (2019). Dinamika Kebijakan Kurikulum Pendidikan di Indonesia Pasca Reformasi. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 5(2), 140–156.
- Khunaifi, A. Y., & Matlani, M. (2019). Analisis kritis undang-undang sisdiknas nomor 20 tahun 2003. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 13(2), 81–102.
- Lingard, B. (2009). Researching education policy in a globalized world: Theoretical and methodological considerations. *Teachers College Record*, 111(14), 226–246.
- Lubis, M. S. A., Fatmawati, E., Pratiwi, E. Y. R., & Sabtohadhi, J. (2022). Understanding Curriculum Transformation Towards Educational Innovation in The Era of All-Digital Technology. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(2).
- M. Amalia, S. Lestari, dan A. M. (2024). Dampak Globalisasi terhadap Sistem Pendidikan Menurut Perspektif Hukum dan Sosiologi. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(2).
- Maharani, R., D. (2022). Dampak Era Globalisasi di Pendidikan (Pendidik dan Peserta Didik). *Faktor Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 9(1).
- Malpass, D. (2022). *Remarks by World Bank Group President David Malpass at the State of Global Learning Poverty 2022 Update Report Launch*.
- Masitoh, S., & Cahyani, F. (2020). Penerapan sistem among dalam proses pendidikan suatu upaya mengembangkan kompetensi guru. *Kwangsan*, 8(1), 332453.
- Morrow, R. A., & Torres, C. A. (2013). The state, globalization, and educational policy. In *Globalization and education* (hal. 27–56). Routledge.
- Muharnis, M., & Fadriati, F. (2023). *Analisis implementasi kebijakan kurikulum pendidikan nasional. Pendekar: Jurnal Pendidikan Berkarakter*, 6 (1), 49–59.
- Mulyasa, E. (2023). *Manajemen Pendidikan dan Transformasi Pembelajaran*. Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, H. E. (2021). *Menjadi guru penggerak merdeka belajar*. Bumi Aksara.
- Mulyono, M. (2011). *Strategi pembelajaran: Menuju efektifitas pembelajaran di abad global*. UIN-Maliki Press.
- Naurah, S., & Firdaus, A. Y. (2025). THE ROLE OF UNICEF IN PREVENTING CHILD SEXUAL VIOLENCE CASE STUDY: P-OCSEA PROGRAM ON DIGITAL PLATFORMS IN INDONESIA (2023). *Journal of Social Political Sciences*, 6(4), 373–393.
- Ozga, J., & Lingard, B. (2007). Globalisation, education policy and politics. In *The RoutledgeFalmer reader in education policy and politics* (hal. 75–92). Routledge.
- Pendidikan, K., Kebudayaan, R., & Indonesia, T. R. (2022). *Panduan implementasi kurikulum merdeka*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Pidarta, M. (2007). *Landasan kependidikan: stimulus ilmu pendidikan bercorak Indonesia*. Rineka Cipta.
- Priestley, M. (2002). Global discourses and national reconstruction: The impact of globalization on curriculum policy. *The Curriculum Journal*, 13(1), 121–138.
- Putri, Z. F., & Maula, N. (2024). *Studi Literatur: Transformasi Kurikulum Indonesia 1947 Sampai Kurikulum Merdeka Dilihat dari Perspektif*

- Model Kurikulum. *Jurnal Teknodik*.
Reuge, N., Jenkins, R., Brossard, M., Soobrayan, B., Mizunoya, S., Ackers, J., Jones, L., & Taulo, W. G. (2021). Education response to COVID 19 pandemic, a special issue proposed by UNICEF: Editorial review. *International Journal of Educational Development*, 87, 102485.
- Rizvi, F., & Lingard, B. (2009). *Globalizing education policy*. Routledge.
- Rogers, C. R. (1969). *Freedom to Learn; a View of what Education Become*. Merrill.
- Rohmah, M. A. Rosyidin, dan A. K. (2024). Harmonisasi Lingkungan Pendidikan Islam dalam Menghadapi Era Globalisasi. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 9(1).
- Rusman. (2022). *Kurikulum dan Pembelajaran*. Rajawali Pres.
- Sagala, S. (2017). *Konsep dan makna pembelajaran: Untuk membantu memecahkan problematika belajar dan mengajar*.
- Sanjaya, D. H. W. (2006). *Strategi pembelajaran berorientasi standar proses pendidikan*.
- Sholeh, M. I. (2023). Transformation of Islamic Education: A Study of Changes in The Transformation of The Education Curriculum. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 20(1).
- Sholikhah, A. (2024). Transformasi Pendidikan melalui Kurikulum Merdeka Belajar dengan Tantangan dan juga Peluang yang Muncul. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2).
- Siska, A. (2024). **PERAN MGMP (MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MENGEMBANGKAN PROFESIONALISME GURU DI SMP TIRTAYASA SUKABUMI BANDAR LAMPUNG**. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Slameto, B. (2010). Faktor-faktor yang mempengaruhi. *Jakarta: Rineka Cipta*, 56–57.
- Suhartini, S., & Hasibullah, M. U. (2025). Tranformasi Pendidikan sebagai Fondasi Pembangunan Nasional di Era Globalisasi. *International Conference on Humanity Education and Society (ICHES)*, 4(1).
- Suyana, N., Dalmeri, D., Sugiharto, S., & Jupriadi, J. (2024). Kebijakan pendidikan nasional menghadapi tantangan global sebuah analisis strategis dan prioritas. *Journal of Education Research*, 5(1), 620–634.
- Syariah, P., Islam, F. A., Muhammadiyah, U., & Utara, S. (2025). *Tersedia: https://pkm.lpkd.or.id/index.php/Din Sos*. 72–80.
- Tilaar. (2003). *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 12. Rineka Cipta.
- Tilaar, H. A. R. (2022). *Politik Pendidikan: Liberalisasi Pendidikan Tinggi di Indonesia dan Malaysia*. Rineka Cipta.
- Uno, H. B. (2014). *Model pembelajaran menciptakan proses belajar mengajar yang kreatif dan efektif*.
- Vulliamy*, G. (2004). The impact of globalisation on qualitative research in comparative and international education. *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, 34(3).
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes* (Vol. 86). Harvard university press.
- Waks, L. J. (2003). How globalization

- can cause fundamental curriculum change: An American perspective. *Journal of Educational Change*, 4(4), 383–418.
- Wibowo, R. T., Zahراسيwi, R. F., Kolo, M. J. D. A., & Lukitoaji, B. D. (2025). Analisis Pengaruh Globalisasi Terhadap Kurikulum Pendidikan. *BASICA ACADEMICA: Jurnal Pendidikan Anak Sekolah Dasar*.
- Winter, C. (2012). School curriculum, globalisation and the constitution of policy problems and solutions. *Journal of Education Policy*, 27(3).
- Yasdin, I. (2023). *Politik Pendidikan Kejuruan: Teori dan Praktik*. Indonesia Emas Group.
- Zain, L. M., & Susilawati, S. (2026). Analisis Faktor Perencanaan Pendidikan: Politik, Identitas Nasional, Ekonomi, Agama, dan IPTEK. *Al-Kindi*, 2(1), 249–260.
- Hasbullah. (2022). *Pengantar politik pendidikan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hamalik, O. (2022). *Pengembangan kurikulum: Teori dan praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2023). *Manajemen pendidikan dan transformasi pembelajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rusman. (2022). *Kurikulum dan pembelajaran*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tilaar, H. A. R. (2022). *Politik pendidikan: Liberalisasi pendidikan tinggi di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sanjaya, W. (2021). *Perencanaan dan desain sistem pembelajaran*. Jakarta: Kencana.
- Lubis, M. S. A., Fatmawati, E., Pratiwi, E. Y. R., & Sabtohadhi, J. (2022). Understanding curriculum transformation towards educational innovation in the era of all-digital technology. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*.
- Sholeh, M. I. (2023). Transformation of Islamic education curriculum development policy in the national education system. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*.
- Basri, H. (2023). Dampak globalisasi terhadap sistem pendidikan: Perspektif sosiologi pendidikan. *Al-Murabbi Jurnal Pendidikan Islam*.
- Frisnoiry, S. (2024). Transformasi pendidikan menuju literasi dalam era globalisasi: Tantangan dan peluang. *Jurnal Pendidikan Matematika Malikussaleh*.
- Amalia, M., & Lestari, S. (2024). Dampak globalisasi terhadap sistem pendidikan menurut perspektif hukum dan sosiologi. *Indonesian Journal of Law and Justice*.
- Rahmawati, Y., & Suryadi, A. (2021). Kebijakan pendidikan di era digital: Tantangan dan peluang. *Jurnal Pendidikan Indonesia*.
- Suyana, N., Dalmeri, D., Sugiharto, S., & Jupriadi, J. (2024). Kebijakan pendidikan nasional menghadapi tantangan global: Analisis strategis dan prioritas. *Journal of Education Research*.
- Sholikah, A. (2024). Transformasi pendidikan melalui Kurikulum Merdeka belajar: Tantangan dan peluang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*.
- Dendodi, D. (2024). Dampak dan tantangan transformasi kurikulum di satuan pendidikan. *Journal of Education Research*.
- Wibowo, R. T., Zahراسيwi, R. F., Kolo, M. J. D. A., & Lukitoaji, B. D. (2025). Analisis pengaruh globalisasi terhadap kurikulum pendidikan. *Basica Academica: Jurnal Pendidikan Anak Sekolah Dasar*.
- Putri, Z. F., & Maula, N. (2024). Transformasi kurikulum Indonesia 1947–Kurikulum Merdeka. *Jurnal Teknodik*.